

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah otonom memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan semua sektor pembangunan yang berada di wilayah kabupaten / kota tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pengelolaan keuangan secara baik, perlindungan aset fisik dan finansial, dan mencegah terjadinya pemborosan aset dan salah urus.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk tidak cepat puas dengan raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit laporan keuangan mereka oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kenyataannya, meski mendapat status WTP, masih banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Banyak di daerah yang dapat WTP, tapi korupsinya tetap jalan, kata Sri

Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Kementerian Keuangan, Kamis (20/9/2018). Sri Mulyani menjelaskan, masih banyak kementerian/lembaga serta pemda yang setelah dapat WTP merasa itu sudah cukup. Padahal, predikat WTP bukanlah tujuan akhir. Jika laporan keuangan kementerian/lembaga atau pemda meraih predikat WTP, mereka harus mengevaluasi kembali apa-apa saja yang bisa dimaksimalkan lagi untuk efisiensi anggaran.

Evaluasi bisa menyorot pada aspek perencanaan kegiatan hingga pengambilan keputusan-keputusan strategis. Laporan keuangan itu harusnya dipakai sebagai alat untuk feed back membuat perencanaan yang lebih baik. Perbaikan pengelolaan negara bertujuan meningkatkan kualitas penggunaan keuangan negara yang lebih baik. Menurut Sri Mulyani, jika setiap kementerian/lembaga dapat menggunakan anggaran secara efektif, pelaksanaan APBN pun akan jadi jauh lebih baik yang pada akhirnya menguatkan pertumbuhan ekonomi. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan, khususnya dari temuan-temuan BPK terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. Temuannya itu misalnya pencatatan aset yang tidak tertib. Artikel ini telah tayang diKompas.com dengan judul Sri Mulyani : Banyak Laporan Keuangan Daerah WTP, tapi Kepala Daerahnya Korupsi (2018).

Pemerintah Kabupaten/kota dalam menjalankan kewenangannya berjalan di atas kebijakan, standart, norma, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga arah pembangunan tetap terjaga pada satu tujuan yaitu Tujuan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, untuk menjalankan roda pembangunan di daerah tersebut maka dibentuklah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dengan mengacu kepada tiga fungsi pemerintahan daerah yaitu melakukan tugas pemerintahan, tugas pembangunan dan tugas pelayanan masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi fungsi di atas pemerintah daerah memberdayakan berbagai sumber dana baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi maupun Dana Bagi Hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan yang menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang terkait dengan penerimaan

dan penggunaan dana publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut dalam hal ini adalah DPRD dan masyarakat luas.

Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan dan harus memiliki ukuran standart pengelolaan serta standart ketercapaian sasaran target pembangunan dan inilah yang lazim disebut dengan istilah *Good Governance*. Sehingga penting untuk meneliti persoalan ini, mengingat banyak pengelolaan keuangan daerah baik itu kota/kabupaten juga masih kurang transparansi, akuntabilitas dan sulit diawasi dari kacamata masyarakat luas. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal apa saja yang mungkin mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012), akuntabilitas keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011), memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus terbuka atas semua informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat. Keterbukaan informasi yang didapat dan keterlibatan publik dalam pengelolaan keuangan adalah awal perencanaan penyusunan APBD melalui musyawarah rencana pembangunan pada berbagai tingkat. Penelitian mengenai hubungan transparansi dengan pengelolaan keuangan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya adalah Siswandi (2013), Siregar (2011), dan Suparno (2012). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siswandi (2013) transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) dan Suparno (2012) yang memberikan bukti empiris bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain transparansi, pengawasan juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dimana pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah selaku pengelola keuangan

daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sudah berjalan dengan efisien, efektif, dan ekonomis atau belum. Penelitian sebelumnya juga memberikan hasil yang berbeda, menurut Siregar (2011) pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012) variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti mengambil judul untuk permasalahan di atas adalah “**PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI (PERIODE 2013-2017)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis memformulasi rumusan masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Akuntabilitas Keuangan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Bekasi?
2. Apakah Transparansi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Bekasi?
3. Apakah Pengawasan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Bekasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Bekasi.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Bekasi.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Bekasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat kepada:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Pengembangan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi Peneliti Lain

Dapat menjadi acuan penelitian mengenai pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat menjadi evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP sehingga terbentuk *Good Governance*.